



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Raya Pattimura No. 1 Ambon 97124 Tel/Fax : (0911) 353377
Website : www.malukuprov.go.id, Email : inspektorat@malukuprov.go.id



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Maluku untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 3 April 2023


PIL. INSPEKTUR DAERAH
INSPEKTORAT

Muhammad Tuasikal, SE., M.Si
Pembina Tk.1/(IV.b)
NIP. 19660505 199803 1 011

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 wajib dilaksanakan sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, yang didalamnya tercantum VISI dan MISI Kepala Daerah Provinsi Maluku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Badan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan berpedoman pada Rencana Strategis, sehingga pada tahun 2021 kekurangan tersebut akan diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja dengan tetap mengacu pada pelaksanaan rencana strategis tahun 2019 – 2024. Disamping keterpaduan dengan unit kerja lain khususnya stakeholder yang menangani permasalahan Kantrantibmas dan Politik di daerah akan terus ditingkatkan sehingga kenyamanan dan kedamaian masyarakat di wilayah Provinsi Maluku dapat terwujud, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Ambon, 09 Maret 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI MALUKU**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku merupakan salah satu bagian dari lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi untuk menunjang pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Maluku di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pelaksanaan program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategik tahun 2019 – 2024 terdiri dari 6 program dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memperlancar pelaksanaan tugas rutin perkantoran, meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai dan meningkatkan kapasitas organisasi dan sumber Daya Aparatur Kesbangpol.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk memelihara ketentraman dan keamanan wilayah.
3. Terciptanya situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat yang kondusif bagi kelancaran, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan.
4. Meningkatnya toleransi keberagaman dan penghargaan masyarakat terhadap pluralitas.
5. Meningkatnya ketahanan masyarakat mengenai Wawasan Kebangsaan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp. 14,375,265,102** dan Realisasinya sebesar **Rp. 13.351.719.563,-** atau **93%**.

Penggunaan dana dari APBD diperuntukkan bagi upaya mewujudkan **VISI** dan **MISI** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, yang tertuang dalam 6 (enam) program :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.**
2. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.**
3. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.**
4. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.**
5. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.**
6. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.**

Informasi yang termuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat melengkapi berbagai informasi yang terkait dengan tingkat capaian kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
	C. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.....	5
	D. Sistematika	6
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
	A. Visi Dan Misi	8
	B. Tujuan Dan Sasaran	9
	C. Kebijakan Dan Program	10
	D. Perjanjian Kinerja	11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	12
	A. Capaian Kinerja Organisasi	12
	I. Sasaran 1	12
	II. Sasaran 2	15
	III. Sasaran 3	18
	IV. Sasaran 4	22
	V. Sasaran 5	26
	VI. Sasaran 6	28
	B. Realisasi Anggaran	33
BAB IV	PENUTUP	38
	Lampiran :	
	1. Struktur Organisasi	
	2. Data Pegawai	
	3. Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah	
	4. Indikator Kinerja Utama	
	5. Pengukuran Kinerja Kegiatan	
	6. Pengukuran Pencapaian Sasaran	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan yang didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Perubahan kondisi global dan demokratisasi serta tuntutan masyarakat agar suatu Instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil. Penerapan manajemen pemerintah yang berorientasi pada hasil ini mengharuskan setiap Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu mendefinisikan ukuran kinerjanya secara spesifik. Ukuran kinerja ini tidak sekedar kinerja dari penggunaan anggaran semata, tetapi dapat bersinergitas dengan ukuran kinerja yang menggambarkan hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang diemban.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku merupakan salah satu bagian dari lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai salah satu fungsi untuk menunjang pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Maluku di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sebagai penjabaran dari pencapaian fungsi diatas melalui penetapan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 – 2024 yang merupakan rangkaian tahapan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku akan berpedoman kepada Rencana Strategis 2019 – 2024.

Sebagai instansi pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat melalui UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas. Untuk menciptakan *Good Governance* diperlukan prinsip-prinsip : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun dan disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku yang merupakan lembaga teknis daerah Provinsi Maluku, dalam penyusunan rencana program Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku mempunyai tugas membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Merumuskan Program di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Rencana Strategis di Daerah / Renstra.
- b) Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c) Melaksanakan Pemerintahan di Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d) Menyelenggarakan Pembinaan Teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e) Membina dan mengendalikan semua kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi terkait lainnya.
- f) Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua Satuan Kerja di lingkungan Badan dalam melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- g) Menghimpun dan menganalisa permasalahan serta memberikan saran / rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi masalah Kesatuan Bangsa dan Politik.
- h) Menetapkan pedoman tata cara pelaksanaan layanan umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- i) Membina, mengawasi, memberi petunjuk dan arahan bagi bawahan dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya serta menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karir berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- j) Menyelenggarakan tata usaha Badan.
- k) Mengevaluasi pelaksanaan semua kebijakan teknis yang telah ditetapkan secara periodik dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan.

- l) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta melaksanakan tugas lain di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- m) Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.
- n) Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut melalui susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat Badan yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yakni :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Fungsional Perencana Ahli Muda
 - Sub Bagian Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
- c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi 2 (dua) Sub Bidang yakni :
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Penanganan Konflik.
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yakni :
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Organisasi masyarakat.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yakni :
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol.
- f. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yakni :
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - Sub Bidang Fungsional Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa.

**C. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN BADAN KESBANGPOL**

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Kesenjangan sosial politik, sosial ekonomi dan budaya.
2. Kemajemukan masyarakat dengan latar belakang SARA yang cukup kental sehingga rentan terhadap isu-isu primordialisme.
3. Pemahaman pendidikan politik di masyarakat masih lemah.
4. Hasil proses politik (Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah) masih sering dipersoalkan oleh kandidat lain.
5. Masih sering terjadi perselisihan antar warga terkait pendirian rumah ibadah.
6. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas, LSM, LNL) belum berperan secara maksimal.
7. Keberadaan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda dan tokoh perempuan belum berperan secara maksimal dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.
8. Pemahaman tentang wawasan kebangsaan perlu diperkuat untuk memperkokoh NKRI.
9. Masyarakat masih rentan terhadap isu-isu yang berpotensi konflik.
10. Penyelesaian masalah masih sering diselesaikan dengan jalan unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis.
11. Konflik wilayah perbatasan dan pertikaian antarwarga, antarpemuda dan antardesa.

Dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diketahui faktor-faktor yang mendorong munculnya permasalahan tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Secara umum, permasalahan tersebut dapat dirangkum menjadi 5 (lima) permasalahan utama untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Kemampuan kelembagaan masyarakat termasuk partai politik masih terbatas baik dari segi manajemen maupun kemampuan finansial membiayai aktifitasnya.
2. Jumlah kelembagaan masyarakat termasuk partai politik cukup besar dibanding dengan kemampuan fiskal pemerintah untuk mendukung pembinaannya.

3. Sering terjadi konflik internal yang berimbas pada fasilitasi pemerintah daerah dan dukungan pemikiran lainnya yang seharusnya tidak relevan lagi di era demokrasi.
4. Masih ditemuinya konflik dan kasus kekerasan antar kelompok masyarakat serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas etnis dan agama tertentu.
5. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan bhineka tunggal ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan gambar umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan analisa per-sasaran startegis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2022 dianalisis dan diperbandingkan dengan capaian per-sasaran strategis Tahun 2021

Bab IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memperhatikan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa, Tujuan Nasional adalah *"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"*. Tujuan Nasional tersebut merupakan cita-cita yang mengekspresikan hakekat kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yang perwujudannya memerlukan upaya-upaya secara terencana, sistematis, komprehensif dan terintegrasi.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2007 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, juga ditegaskan bahwa untuk menjamin agar tugas-tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan pembangunan nasional, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek.

Untuk mewujudkan Agenda Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku menyusun Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku, dimana tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku adalah unsur penunjang pemerintah Provinsi Maluku secara hirarki bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

Untuk mempercepat terwujudnya Visi dan Misi serta Agenda Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku harus merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dan menangani berbagai permasalahan yang terjadi dan memperkuat keberhasilan-keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. Terkait dengan itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku menyusun Rencana Strategis tahun 2019 – 2024 dengan mengacu pada Renstra Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur masa bakti 2019 – 2024.

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu misi, visi, tujuan, sasaran,

kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

Perencanaan strategis ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang kuat bersama untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam berbagai tingkatan pada suatu Institusi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

A. RENCANA STRATEGIS

❖ Visi

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dengan Visi yang hendak dicapai yakni :

"Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan "

❖ Misi

Upaya mewujudkan visi sebagaimana telah diuraikan diatas untuk periode kedepan, maka misi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku adalah :

1. Mewujudkan biokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan murah dan terjangkau.
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
4. Peningkatan infastruktur dan konektivitas gugus pulau
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dam pariwisata.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang professional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

❖ Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kehidupan dan hubungan antar masyarakat yang lebih harmonis	Meningkatnya toleransi keberagaman dan penghargaan masyarakat terhadap pluralitas	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	Persen	10%	10%	10%	10%	10%
			Persentase menurunnya konflik antar desa	Persen	10%	10%	10%	10%	10%
			Persentase menurunnya konflik antar etnis	Persen	10%	10%	10%	10%	10%
2.	Terciptanya situasi dan kondisi keamanan serta ketentraman masyarakat yang kondusif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan	Menurunnya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat Memperkuat kerjasama instusional dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Kantrantibmas	Persentase menurunnya tindak kriminalitas	Persen	10%	10%	10%	10%	10%
			Persentase meningkatnya ketertiban dan kenyamanan lingkungan	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya ketahanan masyarakat sehingga memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat rasa kebangsaaan dan cinta tanah air	Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Terciptanya etika, moral dan budaya politik yang santun dengan semakin mantapkan komunikasi politik antarsupra struktur politik dan infrastruktur	Terlaksananya Pemilu maupun PemiluKada secara demokratis, jujur, adil dan aman	Persentase meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilgub dan Pilpres	Persen	90%	-	-	90%	95%
5.	Meningkatnya kapasitas organisasi dan sumberdaya aparatur Kesbangpol	Meningkatnya kualitas kelembagaan serta kapasitas pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur Kesbangpol melaksanakan tugas dan fungsi	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknis aparatur menjalankan tugas	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1.	Terciptanya situasi dan kondisi keamanan serta ketentraman masyarakat yang kondusif.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku	Persentase aspek kebebasan sipil	(Jumlah kebebasan dari diskriminasi : Total kelompok rentan dimasyarakat) x 100%	Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
			Persentase aspek hal-hak politik	(Jumlah kejadian pelanggaran hak-hak politik : Total variable hak-hak politik) x 100%		Badan Kesbangpol
			Persentase aspek lembaga demokrasi	(Jumlah peran lembaga demokrasi : Total peran Pemda dan lembaga demokrasi) x 100%		Badan Kesbangpol
		Menurunnya tingkat konflik social antar desa dan antar kelompok masyarakat	Jumlah pembinaan Kantrantibmas	Perbandingan jumlah konflik social tahun ini dengan tahun sebelumnya	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesbangpol

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
		Menurunnya intensitas separatisme, radikalisme dan tindak kriminalitas	Jumlah pembinaan separatisme, radikalisme dan tindak kriminalitas	Perbandingan jumlah kasus makar dan criminal tahun ini dengan tahun sebelumnya	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesbangpol
		Menurunnya paham keagamaan bermasalah	Jumlah pembinaan terhadap ormas/aliran keagamaan bermasalah	Perbandingan jumlah kasus intoleransi kehidupan beragama tahun ini dengan tahun sebelumnya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	Badan Kesbangpol
		Menurunnya tingkat peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang	Jumlah pembinaan dalam rangka pencegahan, pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba	Perbandingan jumlah kasus peredaran Narkotika dan obat terlarang tahun ini dengan tahun sebelumnya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	Badan Kesbangpol

❖ **Kebijakan Dan Program**

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada Visi dan Misi, sasaran dan tujuan, yang telah ditetapkan sebelumnya, maka ditetapkan kebijakan, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan peran aparaturnya Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat untuk memelihara keamanan, perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.
2. Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama (KUB), antar golongan dan etnis untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman, rukun dan damai.
3. Menjalin kerjasama infrastuktur dan suprastruktur politik, partisipasi dan kemandirian institusi-institusi sosial, politik, kemasyarakatan dan pemuda dalam rangka turut serta membelah dan mempertahankan persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa.
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta cinta tanah air.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.
6. Menumbuhkan mekanisme kerja kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditopang oleh kemampuan Sumber Daya Manusia yang optimal dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis.
7. Sarana dan prasarana perkantoran untuk pencapaian Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara efektif dan efisien.
8. Penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.

Pelaksanaan kegiatan Rencana Strategis diatas, akan diimplementasikan melalui Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
3. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
4. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku

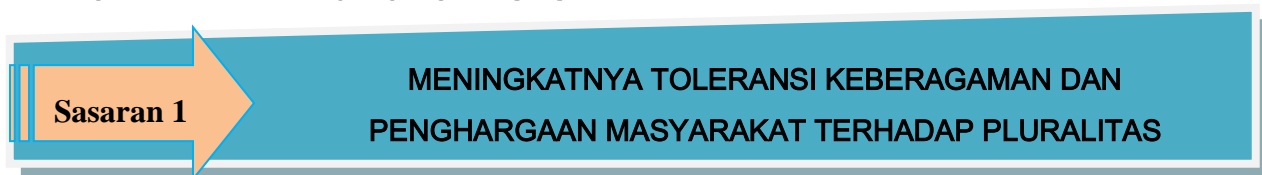
Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (2022)
1	2	3
Meningkatnya toleransi keberagaman dan penghargaan masyarakat terhadap pluralitas	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	10%
	Persentase menurunnya konflik antar desa	10%
	Persentase menurunnya konflik antar etnis	10%
Menurunnya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Persentase menurunnya tindak kriminalitas	10%
Memperkuat kerjasama instusional dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Kantrantibmas	Persentase meningkatnya ketertiban dan kenyamanan lingkungan	100%
Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air	Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air	100%
	Persentase meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama	100%
Meningkatnya kualitas kelembagaan serta kapasitas pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur Kesbangpol melaksanakan tugas dan fungsi	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknis aparatur menjalankan tugas	15 orang
	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dari dana APBD sebesar sebesar Rp. 14.375.265.102,- dengan perincian, dana belanja langsung sebesar Rp. 10.560.139.125,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3,815,125,977,-.

Pada bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku serta aspek keuangan yang mempengaruhi capaian kinerja serta permasalahan terkait strategi pemecahan masalah tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	10%	10%	100%
2	Persentase menurunnya konflik antar desa	10%	-50%	0%
3	Persentase Menurunnya konflik antar etnis	10%	10%	100%
Rata-rata Capaian				100%

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	100%	1000%	10%	0%
2	Persentase menurunnya konflik antar desa	100%	1000%	10%	100%
3	Persentase menurunnya konflik antar etnis	100%	1000%	10%	100%

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan

Target Renstra Tahun 2019-2024

	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2024
1	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	10%	100%
2	Persentase menurunnya konflik antar desa	10%	100%
3	Persentase menurunnya konflik antar etnis	10%	100%

Target persentase menurunnya konflik antar desa adalah 10% realisasi yang dicapai adalah -50% sehingga capaian kinerja adalah 0%. Target 10% berdasarkan pada data persentase menurunnya konflik antar umat beragama pada tahun berjalan sebelumnya, dimana terlihat adanya penambahan kasus pada konflik antar desa tahun 2022 terjadi 10 kasus dan tahun 2021 terjadi 4 kasus sehingga target ditetapkan sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi sehingga menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada tahun 2022 terjadi penambahan kasus konflik antar desa dimana terjadi 10 kasus selama tahun 2022, sedangkan untuk konflik antar umat beragama dan konflik antar etnis tidak ada kasus. Semua konflik yang terjadi selama tahun berjalan dan potensi konflik dapat diredam/dicegah berkat kesiapan dari aparat keamanan, pemerintah daerah beserta masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kantrantibmas di daerah.

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2022 tidak sesuai target Renstra. Memperhatikan pencapaian sampai dengan tahun tahun 2022 dalam hal persentase menurunnya konflik dimasyarakat memberi keyakinan bahwa target indikator kinerja jangka menengah tahun 2022 akan dapat dicapai.

Adapun faktor ketidakberhasilan dari indikator diatas adalah makin tinggi konflik antar desa yang mempengaruhi tidak tercapai capaian indikator untuk itu diperlukannya kerja sama dan peran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini disebabkan karena terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan Kantrantibmas. Selain itu perlu ditingkatkan sinergitas dan kerja sama antar aparat keamanan bersama-sama mencegah dan meredam permasalahan yang mengakibatkan konflik.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu :

- a. Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial dilaksanakan dengan mengikutsertakan sebanyak 50 orang dari unsur masyarakat, pelajar dan mahasiswa di per Kabupaten di 3 (tiga)

Kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Buru Selatan dan Kota Tual tujuannya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan pemahaman bahaya akan paham radikalisme dan pembinaan Kantramtibmas dikalangan masyarakat.

- b. Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial. Kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial (PKS) dan Inventarisasi Data Konflik. Kegiatan Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan di Jakarta dalam rangka evaluasi pelaporan target (B04, B08, B12) dan Rakornas PKS. Sedangkan kegiatan Inventarisasi Data Konflik yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Buru, Maluku Tenggara .Kegiatan konsultasi dan koordinasi pada 4 (empat) kabupaten ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang rukun aman, damai dan kondusif.

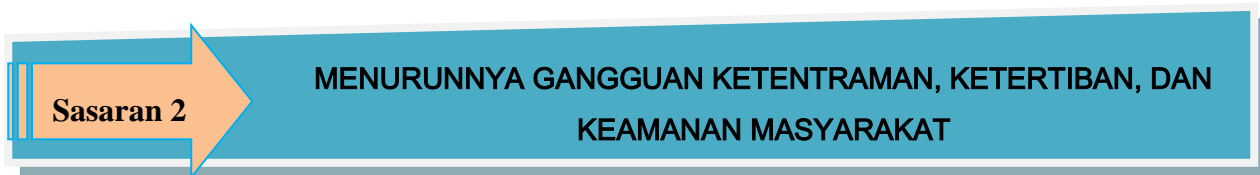
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial mencapai kinerja 97,4% dan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial mencapai kinerja 93% sehingga capaian kinerja cukup memuaskan ditandai dengan capaian input sebesar 100% dan output rata-rata 95%

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran
Meningkatnya Toleransi Keberagaman Dan Penghargaan Masyarakat
Terhadap Pluralitas**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	833.594.520	725,793,981	87.1
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	211,383,020	205,852,210	97.4

Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial			
Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial	384,391,796	357,351,436	93
TOTAL	595,774,816	563,203,646	95

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata 95% dari 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 1 (satu) maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 32.571.170,- atau 5% Dari total anggaran penunjang sasaran 1 (satu) yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku.



Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase menurunnya tindak kriminalitas	10%	-16,67%	0%
Rata-rata Capaian				

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Persentase menurunnya tindak kriminalitas	100%	100%	-16,67%	0%

Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja		Realisasi 2022	Target 2024
1	Persentase menurunnya tindak kriminalitas	10%	100%

Target persentase menurunnya tindak kriminalitas adalah 10% realisasi yang dicapai adalah -16,67% sehingga capaian kinerja adalah 0%. Target 10% berdasarkan pada data persentasi menurunnya tindak kriminalitas pada tahun berjalan sebelumnya, dimana terlihat adanya kasus pada tahun 2021 terjadi 6 kasus dan tahun 2022 terjadi 13 kasus sehingga target ditetapkan sesuai dengan situasi kondisi kantrantibmas yang terjadi dikalangan masyarakat. kondisi daerah Maluku aman dan kondusif tidak ada hal-hal yang mempengaruhi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dikarenakan semakin meningkatnya peran dan kerjasama pemerintah serta masyarakat dalam menjaga kantrantibmas. Sehingga realisasi -16,67% yang diperoleh pada tahun 2022 didapat dari laporan kriminalitas yang terjadi selama tahun berjalan.

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2022 tidak sesuai target Renstra. Memperhatikan pencapaian sampai dengan tahun 2022 dalam hal persentase menurunnya tindak kriminalitas dimasyarakat memberi keyakinan bahwa target indikator kinerja jangka menengah tahun 2023 akan dapat dicapai.

Adapun faktor ketidakberhasilan dari indikator diatas adalah makin meningkatnya Jumlah Kasus Tindak Kriminalitas pada tahun berjalan sehingga mempengaruhi Capaian indikator. Untuk itu adanya kerja keras, kapasitas dan peran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat dalam mengantisipasi masalah-masalah kantrantibmas, hal ini disebabkan karena terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan kantrantibmas dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

- a. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten yaitu, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kota Tual. Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun data dan informasi yang akurat terkait permasalahan-permasalahan orang asing yang mengganggu kerawanan di masyarakat sehingga menjadi bahan masukan untuk Pimpinan sebagai solusi penanganannya.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan untuk Menujang tercapainya target dimana Proporsi anggaran yang belum sesuai dengan target capaian kinerja perangkat daerah sehingga kegiatan-kegiatan mendukung tercapainya target sangat dibatasi karena dalam Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial hamper diseluruh

kabupaten/kota namun karena anggaran yang batasi sehingga hanya dilaksanakan dibatasi.

Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial mencapai kinerja cukup memuaskan ditandai dengan capaian input sebesar 100% dan output rata-rata 61%.

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran
Menurunnya Gangguan Ketentraman, Ketertiban,
dan Keamanan Masyarakat**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	833.594.520	725,793,981	87.1
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial	49,999,769	30,460,000	61
	TOTAL	49,999,769	30,460,000	61

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata 61% dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 2 (dua) maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. Rp. 19.539,769,- atau 39% dari total anggaran penunjang sasaran 2 (dua) yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku.

c. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu kegiatan Pelaksanaan Rapat kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dilaksanakan dengan tujuan membangun koordinasi dan sinergitas antar Pimpinan Daerah dalam upaya pemantapan Kamtibmas di Maluku.

Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mencapai kinerja cukup memuaskan ditandai dengan capaian input sebesar 100% dan output rata-rata 70.3%.

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran
Memperkuat Kerjasama Institusional Dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Penanggulangan Kantrantibmas**

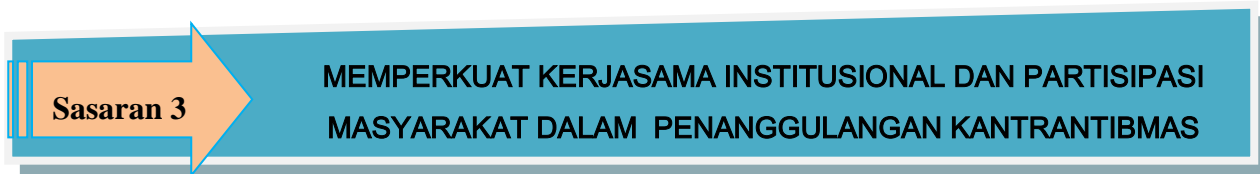
No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	833.594.520	725.793.981	87,1
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	187.819.935	132.130.335	70.3
TOTAL		187.819.935	132,130,335	70.3

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata 70,3% dari 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 2 (dua) maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 49,698,600,- atau 30% dari total anggaran penunjang sasaran 2 (dua) yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi 1 dan 2 tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebanyak 6 (enam) orang sebagai berikut :

1. Kepala Bidang : 1 orang
2. Analis Kebijakan Ahli Muda : 2 orang
3. Analis Keamanan : 1 orang
4. Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat : 1 orang
5. Analis Data Intelijen : 1 orang
6. Pengolah Data Keamanan : -



**Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Tahun 2022**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase meningkatnya ketertiban dan kenyamanan lingkungan	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%

**Perbandingan Capaian Kinerja antara
Tahun 2020 dengan Tahun 2022**

Indikator Kinerja		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Persentase meningkatnya ketertiban dan kenyamanan lingkungan	100%	100%	100%	100%

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan
Target Renstra Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja				Realisasi 2022	Target 2024
1	Persentase meningkatnya ketertiban dan kenyamanan lingkungan			100%	100%

Target persentase meningkatnya ketertiban dan kenyamanan lingkungan adalah 100% realisasi yang dicapai adalah 100% sehingga capaian kinerja adalah 100%. Target 100% berdasarkan pada data meningkatnya ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang diukur dengan menurunnya potensi gangguan kantrantibmas serta hal-hal yang menonjol dikalangan masyarakat pada tahun berjalan sebelumnya.

Berdasarkan laporan situasi keamanan (Lapsi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kondisi daerah Maluku aman dan kondusif tidak ada hal-hal yang menonjol yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dikarenakan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kantrantibmas. Sehingga realisasi 100% yang diperoleh pada tahun 2022 didapat dari data tidak adanya potensi konflik ataupun hal-hal yang mengganggu kantrantibmas dikalangan masyarakat yang mengganggu stabilitas ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang terjadi selama tahun berjalan.

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2022 bahkan ada yang telah melampaui target Renstra. Memperhatikan pencapaian sampai dengan tahun 2022 dalam hal meningkatnya ketertiban dan kenyamanan lingkungan memberi keyakinan bahwa target indikator kinerja jangka menengah tahun 2023 akan dapat dicapai.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah makin meningkatnya kapasitas dan peran aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat dalam mengantisipasi masalah-masalah kantrantibmas, hal ini disebabkan karena terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan Kantrantibmas.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu ;

1. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yaitu
- Kegiatan Forum Dialog bersama Pemda dan Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama yang dilaksanakan di Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur. Tujuannya adalah membangun harmonisasi antara Pemda dengan organisasi kemasyarakatan dalam upaya mengisi pembangunan demokrasi di daerah Maluku.
 - Kegiatan tim terpadu Pengawasan Ormas yang dilaksanakan di Kota Ambon. Tujuannya adalah mengawasi ormas yang ada di Maluku.
 - Hibah Ormas dilaksanakan di Kota Ambon dimana tujuannya memberikan bantuan dana dari Pemda kepada Ormas yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Aru. dimana tujuannya untuk mengsinkronkan data Ormas dari Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut diatas mencapai kinerja cukup memuaskan ditandai dengan capaian input sebesar 100% dan output rata-rata 98%.

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran
Memperkuat Kerjasama Institusional Dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Penanggulangan Kantrantibmas**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	488.816.431	476.600.721	98
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300.160.711	294.973.121	98.3
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	188.655.720	181.627.600	96.3

evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
TOTAL	488.816.431	476,600,721	98

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata **98%** dari 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 3 (tiga) maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 12.215.710,- atau 2% dari total anggaran penunjang sasaran 3 (tiga) yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yaitu melaksanakan Sosialisasi P4GN di Buru Selatan dan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Maluku Barat Daya dengan tujuan adalah membangun koordinasi dan kolaborasi lintas Instansi terkait P4GN dan FKUB, Membangun Hubungan Harmonis antar umat beragama serta dikalangan Pemuda dan Pelajar sehingga terjadi kerukunan dan kedamaian masyarakat di Provinsi Maluku.

Kegiatan tersebut diatas mencapai kinerja cukup memuaskan ditandai dengan capaian input sebesar 100% dan output rata-rata 94%.

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran
Memperkuat Kerjasama Institusional Dan Partisipasi Masyarakat
Dalam Penanggulangan Kantrantibmas**

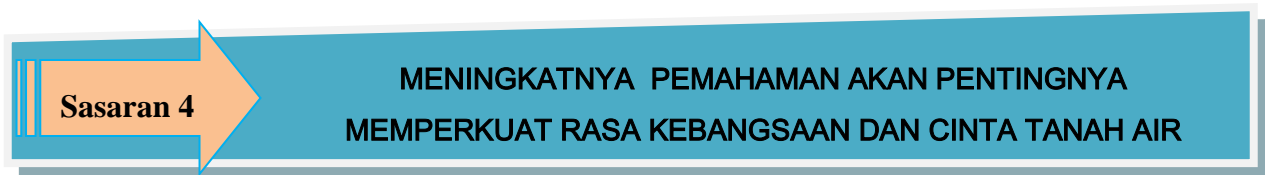
No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	156.038.140	146.509.449	94
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	156.038.140	146.509.449	94
	TOTAL	156.038.140	146.509.449	94

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata **94%** dari 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 3 (tiga) maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.528.691,- atau 6% dari total anggaran penunjang sasaran 3 (tiga) yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi 3 tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama & Ormas sebanyak 8 (delapan) orang sebagai berikut :

- 1. Kepala Bidang : 1 orang
- 2. Analis Kebijakan Ahli Muda : 2 orang
- 3. Analis Ketahanan Sosial : 1 orang
- 4. Analis Ketahanan Ekonomi : 1 orang
- 5. Analis Organisasi Masyarakat : 2 orang
- 6. Pengadministrasi Umum : 1 orang



**Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Tahun 2022**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air	100%	100%	100%
2	Persentase meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%

**Perbandingan Capaian Kinerja antara
Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

Indikator Kinerja		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air	100%	100%	100%	100%
2	Persentase meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	100%	100%	100%	100%

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan
Target Renstra Tahun 2019-2024**

	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2024
1	Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air	100%	100%	100%
2	Persentase meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	100%	100%	100%

Target persentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air dan meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama adalah 100%, realisasi yang dicapai 100% sehingga capaian kinerja adalah 100%. Target 100% berdasarkan pada data laporan per kabupaten sehingga meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air dan toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama yang diukur dengan tidak adanya kejadian kasus makar, berkembangnya paham radikalisme dan degradasi paham ideologi kebangsaan pada tahun berjalan sebelumnya dengan diadakannya sosialisasi kepada masyarakat, pemuda dan pelajar akan pentingnya rasa cinta tanah air dan nilai-nilai toleransi kerukunan antar umat beragama. Dalam Menumbuhkan rasa cinta air melalui Sosialisasi Bela Negara. Bela Negara adalah Sikap dan Perilaku warga negara dijiwai kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 sebagaimana warga negara Indonesia harus siap untuk melakukan bela negara, salah satunya dengan memelihara persatuan dan kesatuan. Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat cinta tanah air, menguatkan kesadaran bela negara, memupuk rasa cinta pada budaya Indonesia. Karena Kesadaran Bela Negara tidaklah tumbuh dengan sendirinya, akan tetapi harus ditanamkan dan tumbuh kembang dengan berbagai upaya contohnya dalam mengikuti sosialisasi Bela Negara. Realisasi 100% pada tahun 2021 diperoleh dari tidak ada kejadian kasus makar ataupun hal-hal yang mengganggu kehidupan beragama masyarakat di daerah Maluku sehingga rasa nasionalisme dan toleransi antar umat beragama tetap terjaga dan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan langkah aparat keamanan yang sangat intens dan sigap dan melakukan tindakan tegas terhadap para simpatisan ormas terlarang yang melakukan tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kenyamanan hidup dilingkungan masyarakat menjadi penting dengan dukungan koordinasi yang sangat intensif antar FKUB, pemerintah dan *stakeholder* terkait.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 untuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air dan meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama di Provinsi Maluku sesuai tabel diatas capaiannya 100% hal ini dikarenakan pada tahun 2021 dan tahun 2022 tidak ada kejadian kasus

makar ataupun masalah-masalah yang mengganggu rasa toleransi kehidupan antar umat beragama di Provinsi Maluku.

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2021 dan 2022 telah mencapai target Renstra. Hal ini membuktikan hubungan harmonis yang terjalin didasari dengan semangat persatuan dan kesatuan yang terbina diantara umat beragama dalam bingkai NKRI serta semakin berperannya masyarakat dan seluruh *stakeholder* dalam menangkal bahaya paham radikalisme dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam upaya semakin meningkatkan rasa toleransi dan kerukunan umat beragama sehingga capaian indikator kinerja sasaran 4 (empat) tahun 2022 adalah 100%. Namun demikian dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku perlu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran selain kegiatan yang selama ini telah dilakukan, agar optimisme pencapaian indikator kinerja jangka menengah tersebut dapat diwujudkan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah semakin berperannya tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam membantu dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan harmonisasi hidup bermasyarakat di Provinsi Maluku serta semakin meningkatnya kesadaran serta rasa tanggungjawab dalam menjaga kerukunan dan kedamaian masyarakat di Provinsi Maluku.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang meliputi:
 - Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai Empat Konsensus Dasar Berbangsa dilaksanakan di 1 (Satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Buru dengan jumlah peserta 75 orang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa cinta tanah air melalui pengetahuan dan pemahaman warga negara terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus dasar berbangsa.
 - Kegiatan Penguatan Gerakan Nasional Revolusi Kebangsaan yang dilaksanakan di 2 (Dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Buru dan kabupaten Buru Selatan yang mengikutsertakan 30 Orang dengan tujuan meningkatkan rasa cinta tanah air melalui penguatan program gerakan nasional revolusi mental di daerah
 - Kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan di kabupaten seram Bagian Barat mengikutsertakan 30 orang dengan tujuan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air melalui kesadaran dan pemahaman warga negara tentang wawasan kebangsaan.
 - Kegiatan Zikir dan Doa Bersama membangun Indonesia dalam Rangka Memperingati HUT RI ke-77 dan HUT Provinsi Maluku ke-77 Tahun 2022

di Kota Ambon mengikutsertakan 1000 orang dari jajaran ASN, TNI Polri dan Organisasi Masyarakat dengan tujuan menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme rasa cinta tanah air.

- b. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang meliputi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tengah dan Buru Selatan. Kemudian melakukan koordinasi di Kalimantan Tengah dan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara yang dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tenggara dengan mengikutsertakan 50 orang yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyediakan rekomendasi penelitian kepada masyarakat peneliti (mahasiswa, peneliti dalam negeri, peneliti asing dan organisasi masyarakat lainnya).
- c. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dilaksanakan di Kota Tual dan Kabupaten Buru dengan tujuan memperkuat data dan informasi terkait pembentukan forum-forum strategis di bidang pembinaan ideologi di daerah.

Kegiatan tersebut diatas menghasilkan kinerja yang memuaskan, dengan capaian input sebesar 100% dan output sebesar 94%.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi 4 (empat) tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebanyak 4 (Empat) orang sebagai berikut :

- 1. Kepala Bidang : 1 orang
- 2. Analis Kebijakan Ahli Muda : 2 orang
- 3. Analis Administrasi Perizinan Penelitian : -
- 4. Pengelola Bimbingan Masyarakat : -
- 5. Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian : -
- 6. Pengadministrasi Umum : 1 orang

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran
Meningkatnya Pemahaman Akan Pentingnya Memperkuat
Rasa Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.864.711.591	1.752.743.698	94
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.388.223.861	1.301.989.078	94
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	408.738.110	389.552.000	95,3
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	67.749.620	61.202.620	90,3
TOTAL		1.864.711.591	1.752.743.698	94

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata 94% maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 111.967.893,- atau 6% Dari total anggaran penunjang sasaran 4 (empat) yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi 4 tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku pada Bidang Politik Dalam Negeri sebanyak 7 (Tujuh) orang sebagai berikut:

1. Kepala Bidang : 1 orang
2. Analis Kebijakan Ahli Muda : 2 orang
3. Analis Politik Dalam Negeri : 2 orang
4. Analis Partai Politik : -
5. Pengadministrasi Partai : 1 orang
6. Pengadministrasi Umum : 1 orang

**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran
Terlaksananya Pemilu Maupun Pemilukada Secara
Demokratis, Jujur, Adil Dan Aman**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.017.651.207	3.640.823.205	91
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik	3.517.260.760	3.220.222.710	92
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik	221.386.932	184.440.000	83,3
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik	279.003.515	236.160.495	85
TOTAL		4.017.651.207	3.640.823.205	91

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata **91%** maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 376.828.002,- atau 9% Dari total anggaran penunjang sasaran 5 (lima) yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku.

Sasaran 5

**MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN SERTA KAPASITAS
PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN TEKNIS APARATUR
KESBANGPOL MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Tahun 2022**

Indikator Kinerja				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya	pengetahuan	dan	15 orang	15 orang	100%

	keterampilan teknis aparatur menjalankan tugas			
2	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%

**Perbandingan Capaian Kinerja antara
Tahun 2021 dengan Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan teknis aparatur menjalankan tugas	15 orang	100%	15 orang	100%
2	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi	100%	100%	100%	100%

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan
Target Renstra Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	
1	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan teknis aparatur menjalankan tugas	15 orang	15 orang	15 orang
2	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi	100%	100%	100%

Target meningkatnya pengetahuan dan keterampilan teknis aparatur menjalankan tugas adalah 15 orang, realisasi yang dicapai 15 orang sehingga capaian kinerja adalah 100% dan target meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi adalah 1 kegiatan, realisasi yang dicapai 1 kegiatan sehingga capaian kinerja adalah 100%. Target 15 orang pada indikator kinerja meningkatnya pengetahuan dan keterampilan teknis aparatur menjalankan tugas disesuaikan dengan kuantitas pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diikutsertakan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis ASN yaitu Bimbingan Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 serta Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mengikutsertakan 5 orang ASN, Bimbingan Teknis Manajemen Pengembangan inovasi daerah berbasis sektor unggulan mengikutsertakan 2 orang, Bimbingan Teknis Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mengikutsertakan 1 orang, Pendidikan dan Pelatihan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 mengikutsertakan 4 orang, Pendidikan dan Pelatihan Perbendaharaan Keuangan Daerah Tahun 2022 mengikutsertakan 1 orang dan Pendidikan dan Pelatihan Intelijen yang dilaksanakan di Jakarta mengikutsertakan

2 orang dengan tujuan peserta memahami terkait teknik intelijen dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Setiap tahun berjalan serta target 1 kegiatan pada indikator kinerja meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan pada kegiatan konsolidasi dan pembinaan Badan Kesbangpol kabupaten/kota se-Maluku yang dilaksanakan untuk membangun koordinasi, sinergi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Maluku.

Pada tahun 2022 program dan kegiatan rutin yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan adanya kerjasama yang baik serta sinergitas yang terbangun antar bidang bersama unsur/ *stakeholder* terkait lainnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 untuk persentase kegiatan yang tercapai sesuai tabel diatas capaiannya 100% hal ini dikarenakan kerjasama yang baik serta terbangunnya sinergitas bersama unsur *stakeholders* terkait.

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2021 dan 2022 hampir mencapai target Renstra. Namun secara umum indicator-indikator kinerja diharapkan dapat mencapai hasil yang ditargetkan oleh Renstra sampai dengan target jangka menengah tahun 2023. Memperhatikan pencapaian sampai dengan tahun 2022, khususnya sejumlah indikator kinerja yang telah mencapai target jangka menengah, memberi keyakinan bahwa target indikator kinerja jangka menengah tahun 2022 akan dapat dicapai. Namun demikian dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku perlu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran selain kegiatan yang selama ini telah dilakukan, agar optimisme pencapaian indikator kinerja jangka menengah tersebut dapat di wujudkan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah makin meningkatnya kapasitas dan peran serta aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui keikutsertaan Pegawai dalam mengikuti Sosialisasi atau Bimtek di kota Ambon dan luar daerah, tersedianya pelayanan administrasi kantor serta tersediannya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan operasional kantor dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku melalui mengikutsertakan pegawai dalam rangka

mengikuti sosialisasi atau Bimtek di Kota Ambon dan di luar daerah, hal ini sesuai dengan target yang direncanakan dikarenakan alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan diklat tersebut dapat terlaksana sesuai dengan target.

- e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan melalui penyediaan 2 (dua) unit komputer dan 6 (enam) unit laptop . Indikatornya adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan bagi pelayanan kantor.
- f. Penyediaan Bahan Logistik kantor yang dilaksanakan melalui kegiatan pengadaan beberapa jenis Alat Tulis Kantor untuk keperluan rutinitas kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.
- g. Penyediaan barang cetak dan penggandaan yang dilaksanakan melalui kegiatan pencetakan sampul surat dan foto copy bahan bahan rutinitas kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku. Indikatornya adalah terpenuhinya sampul surat yang dicetak dan bahan-bahan rutinitas kantor lainnya yang diperbanyak/dicopy.
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan yang dilaksanakan melalui penyediaan sarana informasi berupa surat kabar dan buku peraturan perundang undangan, indikatornya adalah untuk mengetahui perkembangan informasi serta regulasi yang ada.
- i. Fasilitasi kunjungan tamu yang dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat kedinasan serta pelayanan bagi tamu, indikatornya adalah terlayannya makan dan minum bagi tamu serta rapat rapat kedinasan.
- j. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan melalui kegiatan rapat koordinasi maupun konsultasi ke pusat, indikatornya adalah terkoordinasinya pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan rapat dilaksanakan di 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kegiatan konsultasi di 11 (Sebelas) kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/kota dalam mensinergikan program dan kegiatan dibidang kesatuan Bangsa dan Politik secara terarah dan terintegrasi.
- k. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dilaksanakan berupa 5 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan roda empat dengan indikator Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional
- l. Pengadaan Mebel berupa 20 kursi kerja, 1 set kursi tamu, 22 meja kerja, 5 filling cabinet, 1 rak arsip, 3 lemari arsip, 1 brangkas dengan indikator Pengadaan mebel kantor

- m. Penyediaan jasa surat menyurat yang dilaksanakan berupa penyediaan meterai dan perangko serta benda pos lainnya, indikatornya adalah tertanganinya pertanggungjawaban keuangan dan pengiriman jasa surat menyurat.
- n. Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik yang dilaksanakan berupa penyediaan dana untuk pembayaran tagihan telepon/internet (wifi) yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, indikatornya adalah terpenuhinya pembayaran rekening jasa telepon/internet (*wifi*) selama 1 (satu) tahun.
- o. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan alat-alat kebersihan kantor, indikatornya adalah terpenuhinya ruangan kantor yang bersih nyaman dan terawat.
- p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa penyediaan jasa service bagi kendaraan roda empat 1 (Satu) unit selama satu tahun, dan belanja penggantian suku cadang, dan belanja bahan bakar bagi kendaraan roda dua 5 (lima) unit. Indikatornya adalah terawatnya sarana operasional bagi pelayanan kantor.
- q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya dilaksanakan berupa belanja perawatan perlengkapan kantor terhadap 2 (dua) unit komputer dan laptop 6 (enam) unit. Indikatornya adalah terawatnya sarana dan prasarana kantor.

Kegiatan tersebut diatas menghasilkan kinerja yang memuaskan, dengan capaian input sebesar 100% dan output sebesar 99,9%.

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi 5 tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku sebanyak 33 orang secara keseluruhan sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan : 1 orang
- 2. Sekretaris Badan : 1 orang
- 3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik : 6 orang
- 4. Bidang Politik Dalam Negeri : 7 orang
- 5. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa : 4 orang
- 6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas : 8 orang
- 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian : 1 orang
- 7. Perencana Ahli Muda : 1 orang

- 8. Analis Keuangan Pusat dan Daerah : 1 orang
- 9. Bendahara : 1 orang
- 10. Pengadministrasi Umum : 1 orang
- 11. Analis Kinerja : 1 orang

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Serta Kapasitas Pengetahuan Dan Kemampuan Teknis Aparatur Kesbangpol Melaksanakan Tugas Dan Fungsi

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.753.129	51.719.294	99,9
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33.450.000	33.450.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.303.129	18.269.294	99,9
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	431.478.300	424.979.952	98,5
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	431.478.300	424.979.952	98,5
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.462.421.625	1.457.129.930	97
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	169.719.000	169.719.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	77.051.255	76.990.455	99,9
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	58.293.900	58.269.900	99,9
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.640.000	8.640.000	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	87.785.200	87.779.600	99,9
	Penyelenggaraan Rapat Konsultasi dan Konsultasi SKPD	1.060.932.270	1,055,730,975	99,5
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.422.117	695.233.175	99,9
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	542.810.750	542.810.750	100
	Pengadaan Mebel	152.611.367	152.422.425	99,9

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.396.265	459.376.975	99,9
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	3.000.000	2.999.000	99,9
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air Listrik	27.712.000	27.694.546	99,9
Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	428.684.265	428,683,429	99,9
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	98.855.800	98.776.750	99,9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.530.800	70.471.750	99,9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	28.325.000	28.305.000	99,9
TOTAL	3.199.327.236	3.187.216.076	99,7

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai rata-rata 99,7% maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Provinsi Maluku telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 10.253.500,- atau 0,3% Dari total anggaran penunjang sasaran 6 (enam) yang telah dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku

B. REALISASI ANGGARAN

I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pada tahun 2022, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku memperoleh dana sebesar Rp. 19.293.067.768,- dengan perincian, dana **belanja langsung** sebesar Rp. 15.235.040.000,- dan **belanja tidak langsung** sebesar Rp. 4.058.027.769,- Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 sebesar 14.375.265.102,- dengan perincian dana belanja langsung Rp. 10.560.139.125,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.815.125.977,- Pengalokasian Anggaran berdasarkan program yang diadaptasi sesuai Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, sebagai berikut :

**JUMLAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU
BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2022**

No	PROGRAM	Jumlah	%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.199.327.236	30,30
2.	Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.864.711.591	17,66
3.	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.017.651.207	38,05
4.	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	488.816.431	4,63
5.	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	156.038.140	1,48
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	833.594.520	7,89
	T O T A L	10.560.139.125	100

II. Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Program

Adapun rincian pagu dana untuk Belanja Langsung per kegiatan / program APBD Tahun 2022 serta realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	PROGRAM	Jumlah	REALISASI	%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.199.327.236	3.187.216.076	99,7
2.	Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.864.711.591	1.752.743.698	94
3.	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.017.651.207	3.640.823.205	91
4.	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	488.816.431	476.600.721	98
5.	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	156.038.140	146.509.449	94

	Ekonomi, Sosial Dan Budaya			
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	833.594.520	725.793.981	87,1
	T O T A L	10.560.139.125	9.929.687.130	94,0

Berdasarkan tabel tersebut diatas pagu dana yang disediakan untuk membiayai belanja langsung sebesar Rp. 10.560.139.125,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 9.929.687.130,- atau sebesar **94,0%**.

Secara rinci dapat terlihat pada uraian realisasi penggunaan dana sesuai program/kegiatan sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 100%
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 89%
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 98,5%
- e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 100%
- f. Penyediaan Bahan Logistik kantor terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%
- g. Penyediaan barang cetak dan penggandaan terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 100%.
- i. Fasilitasi kunjungan tamu terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%.
- j. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,5%
- k. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 100%
- l. Pengadaan Mebel terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%
- m. Penyediaan jasa surat menyurat terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%

- n. Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%.
 - o. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%
 - p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%
 - q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 99,9%.
- 2. Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**
- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terlaksana dengan input 100% dan output 94%.
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terlaksana dengan input 100% dan output 95,3%.
 - c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela negara, karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terlaksana dengan input 100% dan output 90,3%.
- 3. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik terlaksana dengan input 100% dan output 92%.
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik terlaksana dengan input 100% dan 83,3% output
 - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi politik terlaksana dengan input 100% dan output 85%.

4. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 98,3%.
- b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 96,3%.

5. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

- a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 94%

6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- a. Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 97,4%
- b. Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 93%.
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan orang Asing, Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan Konflik Sosial terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 61%.
- d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi terlaksana dengan input 100% dan output rata-rata 70,3%.

III. Realisasi Belanja Tidak Langsung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tidak langsung dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar **Rp. 3.815.125.977,-** dan yang terealisasi sebesar **Rp. 3.600.309.613,-** atau sebesar **94,4%**.

Secara keseluruhan realisasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana APBD Provinsi Maluku Tahun 2022 mencapai hasil yang memuaskan, dan diharapkan pada tahun 2023, pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku ini dapat dilaksanakan sesuai program untuk mencapai Visi dan Misi yang diharapkan demi terwujudnya masyarakat Maluku yang kondusif sesuai Visi Pemerintah Daerah Maluku.

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya dalam satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 6 (enam) program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku menggambarkan pencapaian presentasi yang sangat memuaskan yaitu **94,0%**.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku adalah kurangnya sarana dan prasarana bagi pegawai dalam pelaksanaan tugas karena beban tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku dalam menciptakan dan memfasilitasi terciptanya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban di masyarakat yang selanjutnya akan berdampak pada keamanan dan ketahanan lokal serta ketahanan bangsa.

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku tahun 2022 adalah merupakan laporan tahunan yang disusun dalam rangka pengukuran kinerja yang sistematis, akuntabel dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana statejik.

Untuk itu dalam mengatasi sejumlah persoalan diatas, guna mengantisipasi permasalahan yang sama maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku mengambil langkah-langkah yaitu mengevaluasi secara mendalam program yang belum maksimal pencapaiannya untuk menemukan strategi yang lebih baik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta perencanaan yang lebih realistis dalam menentukan target yang hendak dicapai dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan yang ada agar hasil yang dicapai optimal, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ambon, 09 Maret 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI MALUKU**



DANIEL EDUARD INDEY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 198902 1 002

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

(Peraturan Gubernur Maluku No. 101 Thn 2021 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Daerah)

PIR. KEPALA BADAN

(Daniel E. Indey, S.Sos, M.Si)
NIP. 19681210 198902 1 002

SEKRETARIAT

(D. Leiwakabessy, SE, M.Sj)
NIP. 197009151994031008

KELOMP. JBTN. FUNGS.

--	--	--	--	--	--	--	--

**SUB BAGIAN UMUM &
KEPEG.**

(Zuhria Marasabessy, S.Sos, M.AP)
NIP. 197105251998032008

**KELOMP. JBTN. FUNGS.
PERENCANA AHLI MUDA**

(Ledy Frisela Gan, S.STP, M.Si)
NIP. 19860301200412 2 002

**KELOMP. JBTN. FUNGS. ANALIS
KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH**

(Nuraini Abubakar, S.Sos)
NIP. 196704151989022002

**BIDANG
BINA IDEOLOGI WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA
(III / a)**

(Achmad Waulet, S.Sos)
NIP. 19670416 199803 1 004

**KELOMP. JBTN. FUNGS. ANALIS
KEBIJAKAN AHLI MUDA**

(Abdi Wasahua, S.Sos)
NIP. 19780418 201001 1 004

**KELOMP. JBTN. FUNGS. ANALIS
KEBIJAKAN AHLI MUDA**

(Rosaria M. Renyaan, S.Sos)
NIP. 19770111 20052 010

**BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI
(III / a)**

(Abdullah Marasabessy, S.STP, M.Si)
NIP. 19790320 199810 1 002

**KELOMP. JBTN. FUNGS. ANALIS
KEBIJAKAN AHLI MUDA**

(Muh. Ikbal, S.Sos)
NIP. 19680430 199903 1 005

**KELOMP. JBTN. FUNGS. ANALIS
KEBIJAKAN AHLI MUDA**

(Moh. Jusuf, S.IP)
NIP. 19740102 199803 1 007

**BIDANG KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA, AGAMA &
ORMAS (III / a)**

(Zachrudin Latuconsina, S.Sos, M.Si)
NIP. 197903152005011006

**KELOMP. JBTN. FUNGS. ANALIS
KEBIJAKAN AHLI MUDA**

(Marly Lewerisa, SE)
NIP. 198403022010012011

**KELOMP. JBTN. FUNGS. ANALIS
KEBIJAKAN AHLI MUDA**

(Artje J. Lalnata, S.Sos, M.Si)
NIP. 197406121995031003

**BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL & PENANGANAN
KONFLIK (III / a)**

(Muh. Syukur Assel, SE, M.Si)
NIP. 196606011999031005

**KELOMP. JBTN. FUNGS. ANALIS
KEBIJAKAN AHLI MUDA**

(Firda Bin Jusuf, S.STP)
NIP. 198302062001012002

**KELOMP. JBTN. FUNGS. ANALIS
KEBIJAKAN AHLI MUDA**

(La Alla, S.Pd, MM)
NIP. 19681103 199512 1 001

**JUMLAH PEGAWAI YANG DIRINCI
MENURUT GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN
PADA BADAN KESBANGPOL PROVINSI MALUKU
TAHUN 2022**

GOL / RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
	PRIA	WANITA		
II/a	-	-	-	
II/b	-	-	-	
II/c	1	-	-	
II/d	-	-	-	
Jumlah	1	-	1	
III/a	1	-	1	
III/b	5	4	9	
III/c	3	1	4	
III/d	4	6	10	
Jumlah	12	11	24	
IV/a	4	1	5	
IV/b	3	-	3	
IV/c	1	-	1	
IV/d	-	-	-	
Jumlah	8	1	9	
Total Seluruh	21	12	34	

**JUMLAH PEGAWAI YANG DIRINCI
MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
PADA BADAN KESBANGPOL PROVINSI MALUKU
TAHUN 2022**

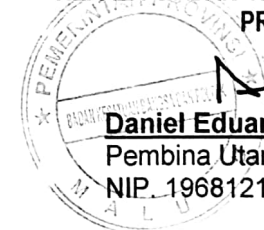
No.	PENDIDIKAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
			PRIA	WANITA	
1.	S D	-	-	-	
2.	SLTP	-	-	-	
3.	SLTA	5	3	2	
4.	SARJANA MUDA	-	-	-	
5.	S1	19	11	9	
6.	S2	9	7	2	
7.	S3	-	-	-	
Jumlah Seluruh		34	21	13	

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1.	Terciptanya situasi dan kondisi keamanan serta ketentraman masyarakat yang kondusif.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku	Persentase aspek kebebasan sipil	(Jumlah kebebasan dari diskriminasi : Total kelompok rentan dimasyarakat) x 100%	Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
			Persentase aspek hal-hak politik	(Jumlah kejadian pelanggaran hak-hak politik : Total variable hak-hak politik) x 100%		Badan Kesbangpol
			Persentase aspek lembaga demokrasi	(Jumlah peran lembaga demokrasi : Total peran Pemda dan lembaga demokrasi) x 100%		Badan Kesbangpol
		Menurunnya tingkat konflik social antar desa dan antar kelompok masyarakat	Jumlah pembinaan Kantrantibmas	Perbandingan jumlah konflik social tahun ini dengan tahun sebelumnya	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesbangpol

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
		Menurunnya intensitas separatisme, radikalisme dan tindak kriminalitas	Jumlah pembinaan separatisme, radikalisme dan tindak kriminalitas	Perbandingan jumlah kasus makar dan criminal tahun ini dengan tahun sebelumnya	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesbangpol
		Menurunnya paham keagamaan bermasalah	Jumlah pembinaan terhadap ormas/aliran keagamaan bermasalah	Perbandingan jumlah kasus intoleransi kehidupan beragama tahun ini dengan tahun sebelumnya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	Badan Kesbangpol
		Menurunnya tingkat peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang	Jumlah pembinaan dalam rangka pencegahan, pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba	Perbandingan jumlah kasus peredaran Narkotika dan obat terlarang tahun ini dengan tahun sebelumnya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	Badan Kesbangpol

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI MALUKU



Daniel Eduard Indey, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 198902 1 002

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2022**

Sasaran		Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	
1	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA yang akuntabel	Rp. 33.450.000	Rp. 33.450.000	100%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang akuntabel	Rp. 18.303.129	Rp. 18.269.294	99,9%	
3	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terakomodirnya ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	Rp. 431.478.300	Rp. 424.979.952	98,5%	
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan penunjang dan kebutuhan kantor	Rp. 169.719.000	Rp. 169.719.000	100%	
5	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Rp. 77.051.255	Rp. 76.990.455	99,9%	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp. 58.293.900	Rp. 58.269.900	99,9%	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 8.640.000	Rp. 8.640.000	100%	
8	Fasilitasi kunjungan tamu	Terfasilitasi kunjungan tamu	Rp. 87.785.200	Rp. 88.732.300	101,1%	
9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan badan	Rp. 1.060.932.270	Rp. 1.059.635.575	99,6%	
10	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp. 542.810.750	Rp. 542.810.750	100%	
11	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel kantor	Rp. 152.611.367	Rp. 152.422.425	99,9%	
12	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanannya pelayanan surat menyurat	Rp. 3.000.000	Rp. 2.999.000.	99,9%	
13	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksanannya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 27.712.000	Rp. 27.694.546	99,9%	

14	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	Rp. 428.684.265	Rp. 428.683.789	99,9%	
15	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	Rp. 70.530.800	Rp. 70.471.750	99,9%	

16	Pemeliharaan/Rehabilitasi saran dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Terpeliharanya peralatan operasional kantor	Rp. 28.325.000	Rp. 28.305.000	99,9%	
17	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan nilai-nilai Konsensus Dasar, Pembumian Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Rp. 1.388.223.861	Rp. 1.301.989.078	94 %	
18	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terkoordinasinya Dewan Pembina FPK serta meningkatnya peran komunitas masyarakat dalam rangka kesadaran bela negara	Rp. 408.738.110	Rp. 389.552.000	95,3 %	
19	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersedianya Data Laporan Potensi Gangguan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Rp. 67.749.620	Rp. 61.202.620	90,3 %	
20	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi tentang Etika dan Budaya Poltik serta terwujudnya tertib administrasi pengajuan, penyerahan, penggunaan dan penyaluran bantuan	Rp. 2.876.363.779	Rp. 2.802.395.096	97,4 %	

21	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya database partai politik Provinsi Maluku	Rp. 69.999.917	Rp. 64.590.850	92,3 %	
22	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terwujudnya kesamaan cara pandang antara Pemda dengan Ormas dalam rangka Pemberdayaan dan pembinaan Ormas di Daerah	Rp. 300.160.711	Rp. 294.973.121	98,3%	
23	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersedianya database ormas, LSM, LNL di Provinsi Maluku	Rp. 188.655.720	Rp. 181.627.600	96,3%	
24	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terciptanya Sinergitas Tim Terpadu P4GN serta meningkatnya peran FKUB dalam kehidupan umat beragama	Rp. 156.038.140	Rp. 146.509.449	94%	
25	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya menjaga Kantramtibmas serta bahaya Paham Radikalisme	Rp. 211.383.020	Rp. 205.852.210	97,3%	
26	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Meningkatnya Keterpaduan dan sinergi dalam Pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi	Rp. 384.391.796	Rp. 358.551.436	93,3%	

	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	terpadu				
27	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	Tersedianya data dan informasi potensi konflik dan keberadaan orang asing di Daerah	Rp. 49.999.769	Rp. 30.460.000	61 %	
28	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terwujudnya koordinasi lintas pimpinan daerah	Rp. 187.819.935	Rp. 159.810.335	85,1%	

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku

No.	Program / Kegiatan	KEGIATAN					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)	Realisasi			
1	3		5	6	7	8	9	10	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumentasi RKA - SKPD	Tersusunnya dokumen RKA yang akuntabel	dokumen	Rp 33,450,000	Rp 33,450,000	100	
		2	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang akuntabel	dokumen	Rp 18,303,129	Rp 18,269,294	100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Terakomodirnya ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	orang	Rp 431,478,300	Rp 424,979,952	98.5	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Penunjang Kebutuhan Kantor	unit	Rp 169,719,000	Rp 169,719,000	100	
		2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	jenis	Rp 77,051,255	Rp 76,990,455	99.9	
		3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Surat Yg Dicetak & Bahan Rutinitas Yg Diperbanyak.	jenis	Rp 58,293,900	Rp 58,269,900	100	
		4.	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan berupa koran atau surat kabar	jenis	Rp 8,640,000	Rp 8,640,000	100	
		5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan Tamu	laporan	Rp 87,785,200	Rp 87,779,600	100.0	
		6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi program/kegiatan Badan	laporan	Rp 1,060,932,270	Rp 1,055,730,975	99.5	

No.	Program / Kegiatan	KEGIATAN					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)	Realisasi			
1	3		5	6	7	8	9	10	
	Pengadaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintah Provinsi		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	unit	Rp 542,810,750	Rp 542,810,750	100	
			Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel kantor	jenis	Rp 152,611,367	Rp 152,422,425	99.9	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	jenis	Rp 3,000,000	Rp 2,999,000	100	
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	jenis	Rp 27,712,000	Rp 27,694,546	99.9	
		3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	orang	Rp 428,684,265	Rp 428,683,429	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Kantor	unit	Rp 70,530,800	Rp 70,471,750	99.9	
		2.	Pemeliharaan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan operasional kantor	paket	Rp 28,325,000	Rp 28,305,000	99.9	
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan nilai-nilai Konsensus Dasar, Pembumian Pancasila serta Wawasan Kebangsaan	Kegiatan dan laporan	Rp 1,388,223,861	Rp 1,301,989,078	93.8	
		2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terkoordinasinya Dewan Pembina FPK serta meningkatnya peran komunitas masyarakat dalam rangka kesadaran bela negara	kegiatan dan laporan	Rp 408,738,110	Rp 389,552,000	95.3	

No.	Program / Kegiatan	KEGIATAN					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)	Realisasi			
1	3		5	6	7	8	9	10	
		3.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersedianya Data Laporan Potensi Gangguan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	laporan	Rp 67,749,620	Rp 61,202,620	90.3	
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya sosialisasi tentang etika dan budaya politik serta terwujudnya tertib administrasi pengajuan, penyerahan, penggunaan dan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik Provinsi Maluku dan penyerahan hibah kepada ormas	kegiatan dan laporan	Rp 3,517,260,760	Rp 3,220,222,710	91.6	
		2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan politik	kegiatan dan laporan	Rp 221,386,932	Rp 184,440,000	83.3	
		3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya database partai politik Provinsi Maluku	laporan	Rp 279,003,515	Rp 236,160,495	84.6	

No.	Program / Kegiatan	KEGIATAN					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)	Realisasi			
1	3		5	6	7	8	9	10	
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terwujudnya kesamaan cara pandang antara Pemda dengan Ormas dalam rangka Pemberdayaan dan pembinaan Ormas di Daerah	kegiatan dan laporan	Rp 300,160,711	Rp 294,973,121	98.3	
		2.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersedianya database ormas, LSM, LNL di Provinsi Maluku	laporan	Rp 188,655,720	Rp 181,627,600	96.3	
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terciptanya Sinergitas Tim Terpadu P4GN serta meningkatnya peran FKUB dalam kehidupan umat beragama	kegiatan dan laporan	Rp 156,038,140	Rp 146,509,449	93.9	
		1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya menjaga Kantramtibmas serta bahaya Paham Radikalisme	kegiatan dan laporan	Rp 211,383,020	Rp 205,852,210	97.4	

No.	Program / Kegiatan	KEGIATAN					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket	
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Rencana Tingkat Pencapaian (Target)	Realisasi			
1	3		5	6	7	8	9	10	
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Keterpaduan dan sinergi dalam Pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi terpadu	Kegiatan dan laporan	Rp 384,391,796	Rp 357,351,436	93.0	
		3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial	Tersedianya data dan informasi potensi konflik dan keberadaan orang asing di Daerah	laporan	Rp 49,999,769	Rp 30,460,000	60.9	
		4.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terwujudnya koordinasi lintas pimpinan daerah	laporan	Rp 187,819,935	Rp 132,130,335	70.3	